

**PERAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER TERHADAP ANAK
DIDIK**

**(Studi Implementasi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Dinas Pendidikan Kota Surabaya)**

M.Saiful Bahchri, Prof.Dr.Sudarsono.SH.MS, Dr. ShintaHadiyantina, SH., MH

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

email : saifulbahchri@yahoo.com

Abstrak

Di dalam penulisan skripsi ini tentang peran Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam penyelenggaraan pendidikan karakter terhadap anak didik. Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam pelaksanaannya masih kurang optimal di bidang sektor kebijakan penyelenggaraan pendidikan karakter. Kurang optimalnya tersebut mengakibatkan kenakalan remaja di kota Surabaya semakin meningkat. Pendidikan karakter sangatlah di butuhkan dalam usai dini. Dalam implementasinya pendidikan karakter di Kota Surabaya masih banyak kendala terkait peran sekolah yang kurang berpartisipasi dan kurangnya sarana prasarana yang kurang memadai sehingga menyebabkan kurang maksimal dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Perlu adanya pedoman yang pasti terhadap sekolah-sekolah agar bisa berpartisipasi pada penyelenggaraan pendidikan karakter. Untuk menangani hambatan tersebut perlu gencar mengingatkan sekolah melalui peran yayasan dan komite sekolah agar dapat aktif dalam pengembangan karakter yang diselenggarakan dinas dan bekerja sama dengan pihak ketiga (swasta) dalam pemenuhan sarana prasarana.

Kata Kunci : Peran, Penyelenggaraan, Pendidikan karakter

abstract

In writing this essay on the role of Surabaya City Department of Education in the implementation of character education for students . Surabaya City Department of Education in the implementation are still not optimal in the field of policy implementation of character education sector . Less than optimal resulted in juvenile delinquency in the city of Surabaya is increasing . Character education is in need in the early hours after . In the implementation of character education in the city of Surabaya is still a lot of problems related to the role of schools that participate less and less a lack of infrastructure to accommodate causing less than the maximum in the implementation of character education . It needs a definite guidelines for schools to be partitioned pada preformance implementation of character education . To deal with these obstacles need to be heavily reminiscent of the school through the role of the foundation and the school committee to be active in the development of character , held in collaboration with agencies and third parties (private) in fulfillment infrastructure .

Keywords : Strategy, Implementation , Education characters

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan sebuah proses untuk membimbing manusia dari kegelapan, kebodohan menuju pencerahan pengetahuan. Pendidikan dalam membimbing dilakukan secara nonformal maupun informal, dengan perkembangan zaman, di dunia pendidikan terus berubah secara drastis sehingga merubah pola pikir yang lebih modern. Dalam perkembangan zaman ini sangat berpengaruh dengan kemajuan pendidikan di Indonesia. Pendidikan memotivasi agar perilaku lebih baik dalam segala aspek sebuah kehidupan sehari-hari. Peran pemerintah, guru dan orang tua sangat berpengaruh dalam sebuah pendidikan karakter. Komunikasi yang intensif antara pemerintah sekolah dengan orang tua menjadi kunci sukses keutuhan pendidikan karakter di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Pengertian pendidikan, fungsi dan tujuan di jelaskan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 yang berbunyi:¹

Pasal 1 ayat (1) :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3 :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tetapi dalam realita lapangan masih banyak pula kasus-kasus yang melibatkan pelajar mulai dari hal kecil sampai besar yang kurang memahami tentang pendidikan karakter seperti meningkatnya pergaulan bebas, maraknya kekerasan anak-anak dan remaja kejahatan terhadap teman, pencurian remaja,

¹ Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

kebiasaan menyontek, penyalagunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan barang milik orang lain.

Banyaknya suatu problematika seperti pemaparan-pemaparan tentang penjelasan masalah pendidikan karakter diatas sektor dari Dinas pendidikan sangat pengaruh dengan meningkatkan mutu dan dengan adanya suatu kebijakan teknis yang berkaitan dengan membangun pendidikan karakter terhadap anak didik. Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan mengeluarkan sebuah kebijakan terkait masalah teknis di bidang pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya No 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, yaitu :

Pasal 57

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
- d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari penjelasan pasal di atas tentang sistem pendidikan bahwasannya output yang diharapkan salah satunya ingin membentuk sebuah karakter. Penguatan pendidikan moral (*moral education*) atau pendidikan karakter (*character education*) dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda dinegara kita.² Untuk menangani pendidikan pemerintah juga mempunyai peran penting dalam membuat kebijakan membangun karakter anak didik. Dari beberapa kasus yang telah di jelaskan bahwasannya di kota surabaya juga masih banyak kasus yang melibatkan seorang pelajar. Dikarenakan kebijakan teknis di bidang pendidikan karakter di Surabaya sangat kurang. Dalam pendidikan khususnya di kota Surabaya dinas pendidikan juga mempunyai peran penting untuk membangun karakter pelajar di surabaya. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Surabaya juga diatur dalam Peraturan

²Sutiono, **Peran sekolah dan keluarga dalam membentuk karakter siswa** , <http://www.sekolahdasar.net/2013/07/peranan-sekolah-dan-keluarga-dalam-membentuk-karakter-siswa.html> di akses pada tanggal 4 april 2014

Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yaitu:

Pasal 16 :

Pemerintah Daerah wajib :

- a. Mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- c. Memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi.

Dari pasal diatas sudah dijelaskan bahwa dinas pendidikan kota Surabaya mempunyai peran penting dan bertanggung jawab mengenai pelayanan, penyelenggaraan, mengatur, mengarahkan, mengawasi penyelenggaraan pendidikan, dan menetapkan standar pelayanan pendidikan.

Setelah melakukan pra survey bahwa Dinas Pendidikan Kota Surabaya sudah melakukan kebijakan mengenai pendidikan karakter. Tetapi realita di lapangan dari data yang telah saya dapatkan dari tahun 2012-2013 masih banyak kasus-kasus kenakalan remaja di Surabaya yang semakin meningkat bukannya tambah menurun. Sesuai peraturan walikota yang telah di jelaskan di atas dinas pendidikan juga mempunyai salah satu peran untuk bertanggung jawab di bidang pendidikan selain peran orang tua dan guru. Jadi kebijakan dinas pendidikan kota Surabaya terutama yang berkaitan tentang pembangunan karakter sangat kurang dengan adanya beberapa kasus yang semakin meningkat dengan melibatkan pelajar. Oleh sebab itu dalam penulisan ini sangat bagus untuk membahas dari sektor kebijakan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam penyelenggaraan pendidikan karakter terkait implementasi UU SISDIKNAS pasal 1.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam penyelenggaraan kebijakan tentang pendidikan karakter di kota Surabaya?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam penyelenggaraan pendidikan karakter?
3. Apa upaya Dinas Pendidikan Kota Surabaya menangani hambatan kebijakan tentang pendidikan karakter?

C. PEMBAHASAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk memahami, mempermudah sekaligus memperlancar penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Yang dimaksud yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang masyarakatan dan pembebasan bersyarat. Secara empiris/sosiologis disini dimaksudkan bahwa penelitian ini didasarkan pada realita dan kenyataan sosial yang ada pada masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena mengkaji mengenai peran Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Pendekatan Penelitian yang digunakan untuk memahami, mempermudah sekaligus memperlancar penelitian ini adalah pendekatan penelitian sosiologis. Menjelaskan untuk mengkaji suatu permasalahan di dalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, yang selanjutnya pada pengidentifikasian masalah dan untuk mencari penyelesaian masalah.³ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu untuk mengetahui secara empiris atau faktual segala yang terjadi dalam suatu kebijakan publik yang dilakukan oleh dinas pendidikan kota Surabaya. Jenis dan bahan hukum tertulis terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden yakni, hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, dua Sekolah yang berada di kota Surabaya. Data Sekunder Merupakan data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk

Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu teknis pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mencatat data, dalam penelitian ini meliputi Dokumen-dokumen instansi yang berhubungan dengan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari dokumen-dokumen instansi yang berhubungan dengan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, buku-buku yang

³ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI PRESS, Jakarta, 1986, hlm. 10

terkait tentang kebijakan serta Peraturan Perundang-Undangan. yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang merupakan data yang bersifat sekunder.

1. Peran Dinas Pendidikan

Pendidikan karakter merupakan salah satu fokus pembangunan SDM yang menjadi prioritas Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Ada Beberapa kegiatan juga yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dalam kaitannya dengan pengembangan pendidikan karakter.⁴Pemerintah memegang peranan sangat penting dalam pengembangan pendidikan karena pemerintah sebagai aktor utama dalam pembuatan kebijakan pendidikan.Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi pemerataan pendidikan adalah kebijakan tentang program sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.Pendidikan inklusif adalah suatu kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh setiap warga negara agar memperoleh pemerataan pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhankhusus maupun normal agar bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan kehidupannya.⁵ Pemerintah sebagai komponen yang sangat penting dalam kegiatan untuk menunjang pembentukan karakter bangsa. Para aparatur negara sebagai penyelenggara pemerintahan merupakan yang pengambil dan pelaksana kebijakan yang ikut dalam menentukan berhasilnya karater bangsa, baik informal, formal, maupun non formal. Pendidikan karakter tidak hanya dilakukan secara informal yang di lakukan di dalam kelas tetapi bisa dilakukan secara nonformal.

Beberapa hal di bawah ini yang dapat dijelaskan untuk membantupeserta didik untuk memahami Pilar Pendidikan Berkarakter,antara lain sebagai berikut:⁶

⁴Hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya

⁵<http://eprints.uny.ac.id/9416/1/bab%201%20-NIM%2007110241016.pdf> di akses pada tanggal 11 november 2014

⁶Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ,Ditjen PAUDNI, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, **NSPK petunjuk teknis, penyaluran, dan pengelolaan bantuan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal**, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013, hlm 12-13.

1. *Trustworthiness* (Kepercayaan):
 - a. Bersikap jujur: jangan menipu, berbohong, menjiplak atau mencuri;
 - b. Keberanian untuk melakukan hal yang benar;
 - c. Membangun reputasi yang baik secara bersama-sama.;
2. *Respect* (Respek):
 - a. Bersikap toleran terhadap perbedaan;
 - b. Bersikap sopan santun;
 - c. Menjaga perasaan orang lain;
 - d. Jangan mengancam, memukul atau menyakiti orang lain;
 - e. Damailah dengan kemarahan, hinaan dan perselisihan;
3. *Responsibility* (Tanggungjawab):
 - a. Selalu melakukan yang terbaik;
 - b. Gunakan kontrol diri dengan baik;
 - c. Selalu bersikap disiplin;
 - d. Berpikirlah sebelum bertindak, dengan mempertimbangkan;
 - e. Konsekuensinya;
 - f. Bertanggung jawab atas pilihan atau tindakan yang diperbuat;
4. *Fairness* (Keadilan):
 - a. Bermain sesuai aturan;
 - b. Ambil seperlunya dan berbagi;
 - c. Berpikiran terbuka, dan biasakan mendengarkan orang;
 - d. Jangan mengambil keuntungan dari orang lain;
 - e. Jangan menyalahkan orang lain secara sembarangan;
5. *Caring* (Peduli):
 - a. Bersikaplah penuh kasih sayang dan menunjukkan kepedulian;
 - b. Selalu mengungkapkan rasa syukur;
 - c. Maafkan orang lain;
 - d. Membantu orang yang kesusahan atau membutuhkan sesuatu;
6. *Citizenship* (Kewarganegaraan):
 - a. Menjadikan sekolah dan masyarakat menjadi lebih baik;
 - b. Membiasakan bekerja sama;

- c. Melibatkan diri dalam urusan masyarakat;
 - d. Menjadi tetangga yang baik;
 - e. Mentaati hukum dan aturan;
 - f. Menghormati otoritas;
 - g. Melindungi lingkungan hidup;
7. Mandiri (*Independent*):
- a. Tidak bergantung kepada orang lain;
 - b. Percaya kepada kemampuan diri sendiri;
 - c. Berani membuat pilihan secara tepat;
 - d. Selalu bekerja keras;
 - e. Tidak gampang dipengaruhi oleh pihak manapun;
8. Demokrasi:
- a. Mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat;
 - b. Terbiasa dengan perbedaan pendapat;
 - c. Mengedepankan prinsip gotong royong;
 - d. Tidak egois atau mau menang sendiri;
 - e. Tidak memandang prinsip orang lain secara sebelah mata;

Dari beberapa penjelasan tersebut untuk membantu peserta didik untuk memahami pilar pendidikan berkarakter. Oleh karena itu Pemerintah harus bisa mempunyai peran untuk membuat kebijakan ini agar peserta didik bisa memahami dasar-dasar dalam pendidikan karakter. Pemerintah juga harus intens melibatkan diri dalam pendidikan karakter ini dengan berbagai regulasi, menetapkan berbagai peraturan daerah yang dapat mendukung pelaksanaan pendidikan karakter. Pemerintah disini yaitu Dinas Pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya No 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, yaitu :

Pasal 57

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
- d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Membentuk karakter peserta didik tidak lepas dari landasan filosofi, visi, misi dan tujuan yang membangun kultur mekanisme organisasi pendidikan yang melibatkan sumber daya manusia di lembaga pendidikan.⁷ Faktor yang menentukan sebuah perubahan, pengembangan, dalam implementasi pendidikan karakter adalah kebijakan dari Dinas Pendidikan yang dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik atau tidak. Dalam teori Howlet dan M. Ramesh salah satu prosesnya tahap akhir dengan adanya evaluasi kebijakan. Evaluasi ini sebagai menjelaskan proses untuk mendapatkan sebuah gambaran tentang kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya, dan tujuan-tujuan apa saja untuk membuat sebuah kebijakan. Kebijakan di sini sebagai petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Seharusnya pemerintah mengkaji ulang tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan karakter di Kota Surabaya agar bisa berjalan dengan baik dan optimal agar terlihat efektif. Dinas Pendidikan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, juga harus mendapatkan hasil kerja yang maksimal dengan berkurangnya kenakalan remaja di Kota Surabaya. Dalam peran Dinas Pendidikan terkait permasalahan kenakalan di Kota Surabaya seharusnya Dinas Pendidikan mempunyai pedoman yang pasti di dalam penerapan kebijakan pendidikan karakter. Perlu adanya sebuah pedoman agar di dalam implementasinya bisa berjalan dengan baik dengan pedoman penyelenggaraan kebijakan pendidikan karakter sebagai acuan.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam penyelenggaraan pendidikan karakter

Di dalam sebuah sarana dan prasarana sangatlah menunjang untuk menyelenggarakan sebuah pendidikan terutama dalam pendidikan karakter. Efek dari meningkatnya kenakalan remaja di Kota Surabaya yaitu kurangnya sarana

⁷Prayitno dan Belferik Manullang, **Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa**, Grasindo, Jakarta, 2011, hlm 39.

dan prasarana yang di fasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Di dalam Peraturan Walikota Surabaya No 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya yaitu :

Pasal 63

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 66

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan Kejuruan mempunyai fungsi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Didalam peraturan walikota Surabaya sudah jelas terkait sarana dan prasarana di Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang harus di jalankan. Di Dinas Pendidikan masih mengalami sebuah hambatan terkait sarana dan prasarana yang harus di jalankan. Sehingga belum bisa menjalankan dengan semaksimal mungkin terkait sarana dan prasarana yang telah di atur di dalam peraturan walikota tersebut. Sarana pendidikan merupakan salah satu penunjang bagi proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana adalah sebagai fasilitas yang secara langsung dan

menunjang proses pendidikan, khususnya dalam belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan yang efektif dan efisien.

3. Upaya Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam menangani hambatan penyelenggaraan pendidikan karakter

Peran yayasan dan komite sekolah disini sebagai kepala untuk menginstruksikan kepada staf-staf sekolah untuk menyelenggarakan apa yang telah di keluarkan kebijakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dengan adanya peran sekolah yang mendukung Dinas Pendidikan Kota Surabaya bisa akan bisa menjalankan apa yang telah dikeluarkan terkait kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter dengan baik dan lancar. Kenakalan remaja pun akan bisa bekurang di Kota Surabaya.

Alasan upaya yang ke dua yaitu bekerja sama dengan pihak ketiga (swasta) dalam pemenuhan sarana prasarana karena untuk membantu infrastruktur dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Surabaya. Di Kota Surabaya sangatlah masih kurang terkait sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurangnya sarana dan prasarana di akibatkan dari banyaknya sekolah swasta dan negeri di Surabaya. Sehingga masih banyak sekolah-sekolah di Surabaya yang belum mendapatkan sarana dan prasarana secara maksimal dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Oleh karena itu dinas pendidikan gencar untuk menjalin sebuah kerja sama dengan pihak ke tiga agar bisa menutupi kekurangan-keurangan yang dihadapi di Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Kerjasama dengan pihak ke tiga adalah hal yang segera harus di lakukan agar pendidikan di Kota Surabaya bisa berjalan dengan lancar. Banyak kerjasama-sama yang harus dilakukan seperti melengkapi perlengkapan sekolah yang sekiranya butuh bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan membuat sebuah acara yang melibatkan siswa antar sekolah untuk mengurangi tawuran antar sekolah. Tanpa adanya kerja sama dengan pihak ke tiga dalam penyelengaran terkait kebijakan pendidikan karakter tidak akan bisa berjalan dengan lancar seperti saat ini. Dengan kerja sama ini pelaksanaan yang di

keluarkan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Surabaya bisa berjalan secara maksimal dan hambatan-hambatan yang di alami bisa berkurang

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Peran Dinas Pendidikan telah di atur di dalam Peraturan Walikota Surabaya No 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya. Dinas Pendidikan kota Surabaya kurang mempunyai pedoman yang pasti terhadap kebijakan pendidikan karakter di sekolah-sekolah serta kurang optimal dalam penerapan kebijakan tersebut. Faktor yang menentukan sebuah perubahan, pengembangan, dalam implementasi pendidikan karakter adalah kebijakan dari Dinas Pendidikan yang dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik atau tidak. Tetapi dalam implementasinya Dinas Pendidikan kurang mempunyai peran dalam kebijakan pendidikan karakter dengan masih meningkatnya kenakalan remaja di Kota Surabaya.
2. Hal hal yang menghambat peran Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di Kota Surabaya yaitu:
 - a. Partisipasi sekolah kurang.
 - b. Sarana Prasarana kurang

Sekolah mempunyai peran penting di dalam membantu penyelenggaraan pendidikan karakter dengan di imbangi adanya sebuah sarana prasarana. Proses penyelenggaraan pendidikan karakter tanpa adanya bantuan peran sekolah maka pendidikan karakter tidak akan bisa berjalan dengan baik.

3. Upaya Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam menangani hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter yaitu:
 - a. Gencar mengingatkan sekolah melalui peran yayasan dan komite sekolah agar dapat aktif dalam pengembangan karakter yang diselenggarakan dinas

b. Bekerja sama dengan pihak ketiga (swasta) dalam pemenuhan sarana prasarana

Adanya sebuah kerjasama dengan pihak swasta dan peran yayasan akan mempermudah Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk menyelenggarakan sebuah pendidikan dengan baik. Upaya tersebut kemungkinan besar bisa membantu dalam program pendidikan karakter.

Saran

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, maka saran yang dapat diambil adalah:

1. Perlu adanya pedoman yang pasti dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam penerapan kebijakan pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Agar sekolah bisa menjalankan dengan baik terkait pedoman yang di keluarkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Serta mengoptimalkan kembali perannya dalam menangani masalah-masalah terkait penerapan kebijakan pendidikan karakter. Agar kenakalan remaja di Kota Surabaya bisa bekurang.
2. Penting diadakannya *upgreding* atau diklat mengenai pendidikan karakter yang di ikuti oleh guru atau kepala sekolah. Agar sekolah juga bisa ikut berpartisipasi dan mempunyai peran dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Sehingga menghasilkan guru-guru yang berkarakter dan bisa di ajarkan kepada anak didik dari segi pelajaran nonformal maupun formal dengan imbangi adanya sebuah sarana dan prasaran..
3. Penting diadakannya kegiatan-kegiatan oleh Dinas Pendidikan dengan menjalinkerjasama dengan pihak ke 3 untuk melengkapi perlengkapan sekolah yang sekiranya butuh bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan membuat sebuah acara yang melibatkan siswa antar sekolah untuk mengurangi tawuran antar sekolah. Peran yayasan dan komite sekolah juga perlu di libatkan agar ikut aktif membantu kegiatan yang di selenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Kota Surabaya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ,Ditjen PAUDNI, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, NSPK petunjuk teknis, penyaluran, dan pengelolaan bantuan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI PRESS, Jakarta, 1986.

Prayitno dan Belferik Manullang, Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa, Grasindo, jakarta, 2011

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Walikota Surabaya No 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Internet

Sutiono, Peran sekolah dan keluarga dalam membentuk karakter siswa ,

<http://www.sekolahdasar.net/2013/07/peranan-sekolah-dan-keluarga-dalam-membentuk-karakter-siswa.html>

<http://eprints.uny.ac.id/9416/1/bab%201%20-NIM%2007110241016.pdf>